

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepemimpinan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya

Putri Maya Sari^{1*}, Dewi Pebriyani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: mayasariputri012@gmail.com

Tanggal Masuk:

21 Mei 2025

Tanggal Revisi:

06 Agustus 2025

Tanggal Diterima:

11 Agustus 2025

Keywords: *Accountability; Effectiveness of Village Fund Management; Leadership; Transparency.*

How to cite (APA 6th style)

Sari, P. M., & Pebriyani, Dewi. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepemimpinan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (3), 1204-1220.

Abstract

This research is motivated by the rampant corruption cases lately in Dharmasraya district. The purpose of this study is to determine the effect of accountability, transparency and leadership on the effectiveness of village fund management. The type of research conducted is quantitative research. This study uses primary data in the form of distributing questionnaires to Village Heads, Village Secretaries, Village Treasurers, Welfare Section Heads, Government Section Heads, Service Section Heads, Planning Section Heads, and Village Assistants. The sample in this study was obtained by distributing 201 questionnaires and 197 questionnaires were processed. The data analysis method used is multiple linear regression analysis with the help of IBM SPSS software. The results of this study indicate that accountability, transparency, and leadership have an effect on the effectiveness of village fund management.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.2963>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap efektivitas pengelolaan dana desa semakin meningkat, seiring dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan dari tingkat paling bawah, yaitu desa. Melalui kebijakan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Salah satu kebijakan penting yang mulai diberlakukan sejak tahun 2015 adalah alokasi dana desa sebesar 10% dari APBN, yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai berbagai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, efektivitas pengelolaan dana desa masih menjadi persoalan krusial. Dalam praktiknya, banyak desa menghadapi tantangan seperti lemahnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, dan kualitas kepemimpinan yang belum optimal. Permasalahan ini semakin

kompleks di tengah minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya sistem pengawasan internal. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas lokal. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi setempat.

Berdasarkan laporan media dan temuan lokal, pengelolaan dana desa di beberapa nagari di Kabupaten Dharmasraya masih menghadapi tantangan serius. Misalnya, kasus tidak diauditnya dana desa sebesar Rp230 juta oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) selama enam tahun berturut-turut menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban (Mitrayuyanti, 2024). Selain itu, adanya dugaan penyimpangan dana oleh Wali Nagari dan Ketua Bamus di beberapa nagari menunjukkan bahwa akuntabilitas dan integritas kepemimpinan desa masih perlu dipertanyakan (Antoni, 2024). Masyarakat juga sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, dan informasi keuangan tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa. Permasalahan-permasalahan ini dapat berdampak langsung pada rendahnya efektivitas penggunaan dana desa, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Fenomena tersebut sejalan dengan data nasional. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa antara 2015–2018 terdapat 181 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp40,6 miliar, di mana kepala desa merupakan aktor utama (Ihsanuddin, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dana desa terus meningkat setiap tahunnya, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Permasalahan tersebut menegaskan pentingnya tiga aspek utama dalam pengelolaan dana desa: akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan. Akuntabilitas dalam konteks ini merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pengelolaan anggaran, dan program kepada masyarakat sesuai Pasal 20 huruf g UU No. 6 Tahun 2014. Akuntabilitas mencerminkan pertanggungjawaban pemerintah desa atas hasil kerja dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang, termasuk masyarakat. Transparansi berarti tersedianya informasi yang terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, untuk mendorong kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan kepala desa dan perangkatnya dalam mengarahkan, mengoordinasikan, memotivasi, serta mengambil keputusan strategis untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan desa berjalan sesuai tujuan. Adapun efektivitas pengelolaan dana desa mengacu pada sejauh mana pengelolaan dana tersebut mampu mencapai tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan, melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang baik dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun telah banyak penelitian yang meneliti variabel-variabel tersebut, hasilnya belum konsisten. Penelitian (Putra & Rasmini, 2019), (Ardiansyah & Hidayat, 2024), dan (Mojo & Rahayu, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun, (Aryanti & Guspendri, 2022) dan (Avellyni & Making, 2021) menemukan bahwa variabel-variabel tersebut tidak selalu signifikan, tergantung pada kondisi internal desa, kapasitas sumber daya manusia, dan tingkat partisipasi masyarakat. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan adanya faktor kontekstual seperti perbedaan sosial, geografis, dan kelembagaan yang memengaruhi hubungan antarvariabel.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk kembali mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa dengan mempertimbangkan akuntabilitas, transparansi,

dan kepemimpinan sebagai variabel independen, dan efektivitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Hubungan antara ketiga variabel independen dan dependen dijelaskan melalui Agency Theory, yang memandang pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Teori ini menekankan pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam hubungan tersebut, agar tidak terjadi konflik kepentingan, moral hazard, dan asimetri informasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan desa melalui penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa yang lebih efektif.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Agency Teory

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi mandat) dan agen (penerima mandat), di mana agen diberi kewenangan untuk bertindak atas nama prinsipal dalam mengelola sumber daya, dengan harapan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks pengelolaan dana publik, teori ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban untuk menghindari konflik kepentingan yang timbul akibat adanya asimetri informasi, yakni kondisi ketika agen (pemerintah desa) memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat sebagai prinsipal. Hal ini membuka potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, moral *hazard*, serta praktik yang tidak akuntabel.

Dalam pengelolaan dana desa, teori agensi sangat relevan karena menempatkan kepala desa dan perangkatnya sebagai agen, sedangkan masyarakat sebagai prinsipal yang memberikan mandat untuk mengelola dana secara efektif, transparan, dan akuntabel. Seperti ditegaskan oleh (Ayuandani & Muniruddin, 2021), kepala desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan pengelolaan dana. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dan mencegah penyimpangan, perlu diterapkan prinsip akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan penggunaan anggaran; transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada publik; serta kepemimpinan yang efektif, yaitu kemampuan agen dalam memimpin secara partisipatif, adil, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penelitian ini, teori agensi menjadi dasar teoretis yang menjelaskan hubungan antara variabel independen; akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan dengan variabel dependen yakni efektivitas pengelolaan dana desa. Ketiganya merupakan mekanisme kontrol atau instrumen yang dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai prinsipal dalam memastikan bahwa agen (pemerintah desa) bertindak sesuai mandat. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Dharmasraya sangat bergantung pada sejauh mana ketiga unsur tersebut diimplementasikan secara optimal, sesuai dengan semangat *good governance* yang ditekankan dalam teori agensi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas, berasal dari kata '*accountability*' yang berarti dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam menjalankan organisasi. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Sriani, 2021). Akuntabilitas dalam mencapai efektifnya pengelolaan dana desa memiliki tujuan yang krusial, yaitu memastikan bahwa dana publik ini digunakan secara efektif demi kesejahteraan

masyarakat desa. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: mendorong transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi terkait penggunaan dana tersebut. Dengan akuntabilitas yang baik, pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pengembangan potensi desa.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan (Mojo & Rahayu, 2023). Transparansi keuangan publik merupakan prinsip dari good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Aryanti & Guspendri, 2022). Dengan adanya transparansi, publik dapat secara aktif terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah, menilai kinerja pemerintah, dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif. Transparansi dalam pengelolaan dana desa, memberikan masyarakat hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui secara detail proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat secara aktif mengawasi penggunaan dana desa, memastikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

Kepemimpinan

William G. Scott (1962) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses yang mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok agar upaya yang mereka tuju dapat tercapai. Kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah, tetapi juga tentang menginspirasi, memotivasi, dan memfasilitasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif adalah kunci untuk mendorong kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kinerja dalam organisasi. Kepala desa sebagai pengelola utama dana desa wajib memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Ayuandani & Muniruddin, 2021).

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas dalam pengelolaan dana desa merupakan ukuran penggunaan dana untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan yang efektif tidak hanya dilihat dari tercapainya target fisik pembangunan, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Efektivitas dalam konteks kinerja mengacu pada tingkat keberhasilan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini diukur dari seberapa baik suatu pekerjaan dilaksanakan, serta sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana desa seluruh kegiatan harus meliputi lima hal berikut dalam mengelola keuangan desa yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Permendagri, 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban aparat desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya yang dikelola kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Putra & Rasmini, 2019b). Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi mekanisme penting untuk menjamin bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan akuntabilitas yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, karena aparat desa terdorong untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam mengelola anggaran, menghindari penyimpangan, serta menyusun laporan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan teori keagenan yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai agen harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai prinsipal. Beberapa penelitian sebelumnya seperti (Mojo & Rahayu, 2023), (Ardiansyah & Hidayat, 2024), dan (Syahriar Abdullah, 2024) juga menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan informasi keuangan dan program secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat (BPK, 2010). Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi berperan penting untuk memastikan bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol penggunaan dana publik, sehingga mendorong pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Hal ini sejalan dengan agency theory yang menjelaskan bahwa dalam hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah desa sebagai agen, transparansi menjadi alat untuk mengurangi asimetri informasi serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh agen. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, kepercayaan masyarakat meningkat dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Beberapa penelitian seperti (Putra & Rasmini, 2019), (Lisa Robiatu Sakdiyah, Utpala Rani, 2023), dan (Yuhanis Ladewi, Taufiq Supriadi, 2020) juga menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang individu untuk mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan dana desa, kepemimpinan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang terarah, partisipatif, dan akuntabel. Seorang kepala desa sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan strategis, serta memastikan bahwa seluruh proses pembangunan desa berjalan sesuai perencanaan. William G. Scott (1962) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan dalam suatu kelompok agar tujuan bersama dapat dicapai. Pemimpin yang efektif dituntut untuk bersikap luwes, komunikatif, serta memiliki kepekaan terhadap situasi di lingkungan sekitarnya.

Dalam perspektif *agency theory*, kepala desa sebagai agen harus mampu mewakili dan mengelola kepentingan masyarakat sebagai prinsipal dengan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan yang baik akan menjembatani perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah desa, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Penelitian sebelumnya oleh (Ayuandani & Muniruddin, 2021), (Hulu & Rahim, 2022), serta (Zada et al., 2023) juga menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengandalkan data hasil pengukuran dan analisis statistik untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian kuantitatif mencoba pengukuran yang tepat dari sesuatu (Cooper & Scindler, 2014). Penelitian ini menguji hipotesis bahwa akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat nagari dan pendamping nagari dari 52 nagari di Kabupaten Dharmasraya, yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara, para Kasi (Kesejahteraan, Pemerintahan, dan Pelayanan), Kaur Perencanaan, serta Pendamping Nagari, dengan total 416 orang responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus dari Isaac dan Michael (1995). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menentukan jumlah responden yang terlibat dalam penelitian dengan tepat. Dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael maka didapatkan total sampel dalam pengumpulan data primer sebanyak 201 responden perangkat nagari di Kabupaten Dharmasraya yang terkait langsung dalam pengelolaan dana desa.

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian adalah data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik survei yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini disusun secara terstruktur, memuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan indikator setiap variabel penelitian. Variabel yang diukur dalam kuesioner adalah akuntabilitas (Sari, 2021), transparansi (Kristianten, 2014), (Jahira, 2022), dan efektivitas pengelolaan dana desa (Permendagri, 2018).

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS. Tahapan yang dipergunakan dalam menguji hipotesis pada penelitian ini terdiri atas analisis deskriptif, uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin data yang diperoleh dari 197 responden, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki, yaitu sebanyak 120 orang atau 61% dari total responden. Sementara itu, responden perempuan berjumlah 77 orang, yang setara dengan 39% dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dalam pengisian kuesioner penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 197 responden yang merupakan perangkat nagari, mayoritas memiliki tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 109 orang atau 55% dari total responden. Selanjutnya, 71 orang (36%) berpendidikan SMA/SMK, selanjutnya 15 orang (8%) yang memiliki pendidikan Diploma 3 (D3), dan hanya 2 orang (1%) yang telah menempuh pendidikan hingga Strata 2 (S2). Temuan ini menunjukkan

bahwa sebagian besar perangkat nagari memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, dengan mayoritas berada pada jenjang sarjana (S1). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa perangkat nagari yang terlibat dalam penelitian ini memiliki kemampuan akademik yang memadai, yang berpotensi mendukung efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di pemerintahan nagari.

Tabel 1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Presentase
1.	18-20 Tahun	0	0%
2.	21-30 Tahun	55	28%
3.	31-39 Tahun	88	45%
4.	>40 Tahun	54	27%
Total		197	100%

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 1 dari 197 responden, distribusi usia menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 31–39 tahun, yaitu sebanyak 88 orang dengan presentase 45%. Selanjutnya, responden dengan rentang usia 21–30 tahun berjumlah 55 orang dengan presentase 28%, diikuti oleh responden yang berusia di atas 40 tahun sebanyak 54 orang dengan presentase 27%. Sementara itu, tidak terdapat responden yang berasal dari kelompok usia 18–20 tahun dengan presentase 0%. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan individu yang berada pada usia produktif dan matang secara professional.

Tabel 2.
Karakteristik Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Responden	Presentase
1.	Wali Nagari	24	12%
2.	Sekretaris	25	13%
3.	Bendahara/Kaur Keuangan	26	13%
4.	Kasi Kesejahteraan	24	12%
5.	Kasi Pemerintahan	26	13%
6.	Kasi Pelayanan	25	13%
7.	Kaur Perencanaan	23	12%
8.	Pendamping Nagari	24	12%
Total		197	100%

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 2 terdapat delapan jenis jabatan yang dijabat oleh 197 responden perangkat nagari. Jabatan yang paling banyak mengisi kuesioner adalah Bendahara/Kaur Keuangan dan Kasi Pemerintahan, masing-masing sebanyak 26 orang atau 13%. Disusul oleh jabatan Sekretaris dan Kasi Pelayanan sebanyak 25 orang (13%), kemudian Wali Nagari, Kasi Kesejahteraan, dan Pendamping Nagari masing-masing 24 orang (12%). Jabatan dengan jumlah responden paling sedikit adalah Kaur Perencanaan, yaitu sebanyak 23 orang atau 12%. Hal ini menunjukkan distribusi responden cukup merata di berbagai jabatan perangkat nagari.

Tabel 3.
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1.	S1	109	55%
2.	D3	15	8%
3.	S2	2	1%
4.	SMA/SMK	71	36%
Total		197	100%

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Hasil penelitian pada Tabel 3. menunjukkan bahwa mayoritas dari 197 responden perangkat nagari memiliki tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 109 orang (55%). Disusul oleh responden berpendidikan SMA/SMK sebanyak 71 orang (36%), kemudian 15 orang (8%) berpendidikan Diploma 3 (D3), dan hanya 2 orang (1%) yang memiliki pendidikan Strata 2 (S2). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perangkat nagari memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, khususnya pada jenjang sarjana.

Tabel 4.
Karakteristik Berdasarkan Masa Jabatan

No	Masa Jabatan	Jumlah Responden	Presentase
1.	< 2 Tahun	25	13%
2.	3-5 Tahun	60	30%
3.	6-10 Tahun	69	35%
4.	> 10 Tahun	43	22%
Total		197	100%

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4 dari 197 responden masa jabatan perangkat nagari paling banyak adalah 6-10 tahun yaitu sebanyak 69 orang (35%), kedua 3-5 tahun yaitu sebanyak 60 orang dengan presentase 30%, ketiga >10 tahun yaitu sebanyak 43 orang (22%) dan terakhir < 2 tahun yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase 13%. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa sebagian besar perangkat nagari memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di pemerintahan nagari Kabupaten Dharmasraya.

Analisis Deskripif

Tabel 5.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	197	27,00	40,00	35,8426	3,57865
Transparansi	197	15,00	24,00	21,4264	2,44342
Kepemimpinan	197	29,00	40,00	35,3553	3,76689
Efektivitas					
Pengelolaan Dana	197	19,00	28,00	24,7208	2,78996
Desa					
Valid N (listwise)	197				

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dari tabel 5 di atas terhadap 197 responden, diketahui bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 35,8426 dengan standar deviasi 3,57865, serta nilai minimum 27 dan maksimum 40. Variabel transparansi menunjukkan nilai mean sebesar 21,4264, dengan standar deviasi 2,44342, nilai minimum 15, dan maksimum 24. Untuk variabel kepemimpinan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 35,3553 dengan standar deviasi 3,76689, nilai minimum 29 dan maksimum 40. Sementara itu, variabel efektivitas pengelolaan dana desa memiliki nilai mean sebesar 24,7208, standar deviasi 2,78996, nilai minimum 19, dan maksimum 28. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi responden perangkat nagari terhadap seluruh variabel berada pada kategori tinggi dengan sebaran data yang cukup stabil.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 6.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	0,891	0,60	Reliabel
X2	0,823	0,60	Reliabel
X3	0,906	0,60	Reliabel
Y	0,865	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai Croachbach's Alpha untuk ke 4 variabel yang diteliti memiliki nilai koefisien Croachbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau instrument yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas, transparansi, kepemimpinan dan efektivitas pengelolaan dana desa dan dinyatakan konsisten dan *reliable*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 7.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		197
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,17520653
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,056
	Negative	-0,081
Kolmogorov-Smirnov Z		1,143
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,147

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai sebesar 1,143 dengan tingkat signifikansi 0,147. Karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal dan memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 8.
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	0,353	2,829
	Transparansi	0,456	2,194
	Kepemimpinan	0,423	2,366
a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa			

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 8 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, yaitu akuntabilitas dengan VIF = 2,829, transparansi dengan VIF = 2,194, dan kepemimpinan dengan VIF = 2,366. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,449	0,583		2,487	0,014
Akuntabilitas	0,020	0,026	0,093	0,777	0,438
Transparansi	0,005	0,033	0,015	0,146	0,884
Kepemimpinan	-0,039	0,022	-0,192	-1,748	0,082

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan hasil uji Glejser, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,438, transparansi sebesar 0,884, dan kepemimpinan sebesar 0,082. Seluruh nilai signifikansi tersebut $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 10.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,910	0,987		-0,922	0,358
Akuntabilitas	0,153	0,044	0,196	3,499	0,001
Transparansi	0,330	0,056	0,289	5,852	0,000
Kepemimpinan	0,370	0,038	0,499	9,716	0,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Dari tabel 10 di atas dapat ditulis persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -0,910 + 0,153X_1 + 0,330X_2 + 0,370X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui:

1. Konstan bernilai negatif sebesar -0,910, artinya apabila variabel Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) dan kepemimpinan (X_3) bernilai 0 maka nilai tetap atau nilai awal mengenai efektivitas pengelolaan dana desa -0,910.
2. Nilai koefisien regresi akuntabilitas adalah 0,153 artinya jika variabel akuntabilitas meningkat maka akan menyebabkan kenaikan terhadap efektivitas pengelolaan dana

desa sebesar 0,153 (15,3%). Jadi akuntabilitas berhubungan positif secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

3. Nilai koefisien regresi transparansi adalah 0,330 artinya jika variabel transparansi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 0,330 (33%). Jadi transparansi berhubungan positif secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
4. Nilai koefisien regresi kepemimpinan adalah 0,370 artinya jika variabel kepemimpinan meningkat maka akan menyebabkan kenaikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa sebesar 0,370 (37%). Jadi kepemimpinan berhubungan positif secara parsial terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi Adjusted R Square

Tabel 11.
Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,886 ^a	,785	,782	1,30382

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,782 atau 78,2%. Ini berarti bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan (variabel independen) secara bersama-sama memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa (variabel dependen) sebesar 78,2%. Sisa 21,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji F

Tabel 12.
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1197,552	3	399,184	234,820
	Residual	328,092	193	1,700	
	Total	1525,645	196		

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Kepemimpinan, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 12 diatas hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai Fhitung adalah sebesar 234,820, sedangkan nilai Ftabel untuk taraf nyata (α) 5% atau 0,05 df pembilang (k=4) jadi k-1 = 3 dan df penyebut = n-k = (197-4) = 193 maka dapat diketahui Ftabel sebesar 2,65 dengan kata lain Fhitung > Ftabel (234,820 > 2,65), sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Maka Akuntabilitas, transparansi dan kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Dari hasil uji F

diketahui bahwa nilai sigifikansi (sig) adalah sebesar 0,000 yang berarti $F_{sig} (0,000 < 0,005)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan signifikan mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil Uji t

Tabel 13.
Hasil Uji t

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Model	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,910	0,987		-0,922	0,358
	Akuntabilitas	0,153	0,044	0,196	3,499	0,001
	Transparansi	0,330	0,056	0,289	5,852	0,000
	Kepemimpinan	0,370	0,038	0,499	9,716	0,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2025

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 13 diatas menunjukkan bahwa :

- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,499, yang lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,97233. Selain itu, nilai signifikansi (t sig) untuk X1 adalah 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Hipotesis 1 diterima).
- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel transparansi (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,852, yang lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,97233. Selain itu, nilai signifikansi (t sig) untuk X2 adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, dan (Hipotesis 2 diterima).
- Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 9,716, yang lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,97233. Selain itu, nilai signifikansi (t sig) untuk X3 adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,005. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Hipotesis 3 diterima).

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Dharmasraya

Hipotesis pertama pada penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh hasil uji statistik t yang menunjukkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai t_{hitung} sebesar 3,499 (lebih besar dari $t_{tabel} = 1,97233$). Selain itu, koefisien beta (β) akuntabilitas bernilai positif, yaitu sebesar 0,153 atau 15,3%. Artinya, temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, yang mencakup kewajiban aparatur desa untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pihak terkait, memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan kata lain, semakin tinggi

tingkat akuntabilitas dalam tata kelola desa, maka akan semakin baik pula hasil dan dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiansyah & Hidayat, 2024) dan (Putra & Rasmini, 2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Karena akuntabilitas menjadi landasan utama dalam setiap bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dana nagari yang harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, serta mendorong seluruh perangkat nagari untuk bertindak sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Dharmasraya

Hipotesis kedua pada penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan nilai signifikansi (sig) untuk transparansi adalah $0,000 < 0,05$ serta nilai thitung sebesar $5,852 > ttabel = 1,97233$ dengan nilai koefisien beta (β) transparansi bernilai positif yaitu sebesar 0,330 atau 33%. Artinya, temuan ini menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Ketika masyarakat diberikan akses yang jelas dan terbuka terhadap informasi penggunaan dana desa, maka tingkat kepercayaan publik meningkat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi lebih aktif, serta potensi terjadinya penyimpangan anggaran dapat diminimalisir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Taslim, 2021) dan (Mojo & Rahayu, 2023) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Karena dengan adanya transparansi mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa serta dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa.

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Dharmasraya

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh hasil uji statistik t yang menunjukkan nilai signifikansi (sig) untuk kepemimpinan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai thitung sebesar 9,716 (lebih besar dari $ttabel = 1,97233$). Selain itu, nilai koefisien beta (β) untuk partisipasi masyarakat adalah positif, yaitu sebesar 0,370 atau 37%. Artinya, temuan ini menunjukkan bahwa peran seorang pemimpin di tingkat nagari seperti Wali Nagari sangat menentukan arah dan keberhasilan pengelolaan dana desa. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang optimal, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas teknis, tetapi juga integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayuandani & Muniruddin, 2021) dan (Sriani, 2021) menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan yang baik mencerminkan tanggungjawab dan akuntabilitas aparatur desa dalam mengelola dana desa secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan memiliki

pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada tingkat nagari di Kabupaten Dharmasraya. Akuntabilitas yang baik mendorong aparat nagari untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga terbukti meningkatkan kepercayaan publik serta memperkecil peluang terjadinya penyelewengan. Selain itu, kepemimpinan yang efektif mampu mengarahkan, mengelola, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan desa dengan baik, sehingga tujuan pengelolaan dana desa dapat tercapai secara optimal.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak dapat mendampingi secara langsung responden saat pengisian kuesioner. Kuesioner diserahkan melalui pihak nagari, sehingga berpotensi menimbulkan bias, seperti ketidaktepatan dalam memahami pertanyaan atau kemungkinan diisiny kuesioner oleh pihak selain responden yang dituju. Kedua, penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan. Sementara itu, masih terdapat berbagai variabel lain seperti partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa, dan pengawasan yang juga berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dan sebaiknya dikaji lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

Saran

Bagi pemerintah desa di Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dengan lebih memperhatikan beberapa aspek dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama akuntabilitas, transparansi, dan peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membantu menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar dari yang telah diteliti dalam studi ini guna mengembangkan penelitian yang relevan serta memperkaya literatur yang ada. Selain itu, penelitian mendatang juga sebaiknya memperluas cakupan objek penelitian, baik pada sektor pemerintahan lainnya maupun pada sektor swasta, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, S. (2024). *Kejaksan tetapkan tersangka kasus korupsi dana Nagari di Dhamasraya*. Antara Sumbar. <https://sumbar.antaranews.com/berita/608787/kejaksan-tetapan-tersangka-kasus-korupsi-dana-nagari-di-dhamasraya>
- Ardiansyah, R., & Hidayat, M. T. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal IAKP*, 5(2), 57–64.
- Aryanti, L., & Guspendri, N. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di nagari lansek kadok kecamatan rao selatan kabupaten pasaman. *JakSy: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 49–61.
- Avellyni, A., & Making, L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Ayuandani, K., & Muniruddin, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(1), 618–636. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i1.1582>

- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cooper, D. R., & Scindler, P. S. (2014). *Business research methods, Edisi 12*.
- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpina Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4.
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1096/1096>
- Ihsanuddin, I. D. W. (2018). *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>
- Jahira. (2022). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tongkonan Basse Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kristianten. (2014). Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah. *Ekonisia*.
- Lisa Robiatu Sakdiyah, Utpala Rani, R. W. B. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.pdf*.
- Mitrayuyanti. (2024). *Enam Tahun Dana Desa Rp 230 Juta untuk Peternakan Sapi Raib, Inspektorat Dharmasraya Dituding Lalai*. Media Investigasi.
<https://www.mediainvestigasi.net/enam-tahun-dana-desa-rp-230-juta-untuk-peternakan-sapi-raib-inspektorat-dharmasraya-dituding-lalai/>
- Mojo, A., & Rahayu, Y. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9–18.
<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5865>
- Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019a). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28,132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019b). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Sari, C. P. (2021). *Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
- Sriani, N. M. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*.
<https://bali.tribunnews.com>
- Syahriar Abdullah, V. Y. (2024). *The Influence of Transparency and Accountability in Village Fund Management in Ngablak District, Magelang Regency.pdf*.
- Taslim, A. A. (2021). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pebaloran Kecamatan Curio kabupaten Enkareng*.
- Yuhanis Ladewi, Taufiq Supriadi, H. S. (2020). *The Effect Of Accountability And Transparency Of Village Fund Management.pdf*.

Zada, M., Khan, J., Saeed, I., Zada, S., & Yong Jun, Z. (2023). Linking public leadership with project management effectiveness: Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support. *Heliyon*, 9(5).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15543>